



Peran Kepala Sekolah dalam Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di SMA Negeri di Kabupaten Batanghari

Ar Rozi Zikri

Universitas Jambi, Indonesia

E-mail: arrozizikri66@gmail.com

Article Info	Abstract
Article History Received: 2023-10-12 Revised: 2023-11-23 Published: 2023-12-02 Keywords: <i>The Role of the Principal; School-Based Management.</i>	<p>The purpose of this study was to determine the implementation and role of school principals in implementing MBS. Another objective is to identify the inhibiting and supporting factors of the implementation of MBS in public high schools in Batanghari Regency. This research is a descriptive qualitative research. The method used in this research is qualitative method. The location of the research was SMAN 5, SMAN 4, and SMAN 7 in Batanghari Regency. The subjects of this study were the Principal, Vice Principal, Chairman of the School Committee, Student Guardians, Teachers, and Students. The instrument used in data collection was an interview list. The data analysis carried out in this study was qualitative analysis with a gradual triangulation model. The results showed that the implementation of MBS in SMAN 5 was the best, while SMAN 4 was below it and SMAN 7 was the lowest. The role of the principal of SMAN 5 in the implementation of MBS is quite optimal, while the role of the principal of SMAN 4, and 7 still has a lot to be improved. Factors that hindered the implementation of SBM were regulations that kept changing, curriculum policies that kept changing, funding, and low community participation and attention. Factors that support the implementation of MBS are the discipline and motivation of all school components to advance education and teaching in public high schools in Batanghari Regency. Based on the results of the study, it can be concluded that the role of the principal in implementing MBS is less than optimal and still needs to be improved.</p>
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2023-10-12 Direvisi: 2023-11-23 Dipublikasi: 2023-12-02 Kata kunci: <i>Peran Kepala Sekolah; Manajemen Berbasis Sekolah.</i>	<p>Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi dan peran kepala sekolah dalam penerapan MBS. Tujuan yang lain adalah untuk mengidentifikasi faktor penghambat dan pendukung dari implementasi MBS di SMA Negeri yang ada di Kabupaten Batanghari. Penelitian ini jenis penelitian deskriptif kualitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Lokasi penelitian dilaksanakan di SMAN 5, SMAN 4, dan SMAN 7 yang ada di Kabupaten Batanghari. Subjek Penelitian ini adalah Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Ketua Komite Sekolah, Wali Siswa, Guru, dan Siswa. Instrumen yang digunakan dalam pengambilan data adalah daftar wawancara. Analisis data yang dilaksanakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan model triangulasi bertahap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi MBS di SMAN 5 adalah yang terbaik, sedangkan SMAN 4 berada dibawahnya dan SMAN 7 berada pada urutan terendah. Peran kepala sekolah SMAN 5 dalam penerapan MBS cukup optimal, sedangkan peran kepala sekolah SMAN 4, dan 7 masih banyak yang harus ditingkatkan. Faktor yang menghambat dalam penerapan MBS adalah peraturan yang terus berubah-ubah, kebijakan kurikulum yang terus berubah-ubah, pendanaan dan partisipasi dan juga perhatian masyarakat yang masih rendah. Faktor yang mendukung penerapan MBS adalah disiplin dan motivasi semua komponen sekolah untuk memajukan pendidikan dan pengajaran di SMA Negeri yang ada di Kabupaten Batanghari. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peran kepala sekolah dalam implementasi MBS kurang optimal dan masih perlu ditingkatkan.</p>

I. PENDAHULUAN

Jurnal Kebijakan otonomi daerah telah memberikan dampak pada sistem pengelolaan atau manajemen dari berbagai bidang pemerintahan. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang selanjutnya diubah dengan UU No.32 Tahun 2021 tentang Otonomi Daerah, dan secara

teknis diatur dalam PP No. 33 Tahun 2021 menyebutkan bahwa otonomi daerah merupakan penggeseran kewenangan dan pemerintah pusat ke pemerintah daerah dalam berbagai bidang termasuk bidang pendidikan. Otonomi bidang pendidikan diimplementasikan dalam bentuk pengelolaan penyelenggaraan pendidikan yang

lebih menekankan pada kemadirian sekolah dengan menghadirkan sistem pengelolaan yang berbasis pada sekolah. Menurut Nurkolis (2019), pengelolaan pendidikan yang berbasis pada sekolah dikenal dengan istilah MBS (Manajemen Berbasis Sekolah). Hal tersebut juga dimuat dalam Pasl 51 UU No.20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang menyatakan bahwa pengadaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah didasarkan pada standar pelayanan minimum dengan prinsip manajemen berbasis sekolah.

Munculnya paradigma/model baru tentang manajemen berbasis sekolah (MBS) yang bertumpu pada penciptaan iklim yang demokratis dan pemberian kepercayaan yang lebih luas kepada sekolah untuk menyelenggarakan pendidikan secara efisien dan berkualitas. Dengan demikian dapat mendorong profesionalisme kepala sekolah dalam peranannya sebagai manajer maupun pemimpin sekolah. Sistem pengelolaan sekolah yang dilakukan dengan Manajemen Berbasis Sekolah mulai diterapkan di Indonesia sejak tahun 2000.

Implementasi MBS di Indonesia secara rutin setiap tahun dievaluasi. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Atas dan Perguruan Tinggi (2021) melaporkan hasil evaluasi dari penerapan MBS di Indonesia dengan melihat lima indikator yaitu, 1) peningkatan manajemen sekolah yang lebih transparan, partisipatif, demokratis, dan akuntabel, 2) peningkatan mutu pendidikan, 3) menurunnya tingkat putus sekolah, 4) peningkatan implementasi pembelajaran yang berpusat pada siswa, dan 5) peningkatan peran serta masyarakat terhadap pendidikan di sekolah menengah atas. Evaluasi yang telah dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Atas dan Perguruan Tinggi (2021) menyebutkan bahwa, pelaksanaan MBS masih belum optimal, terutama pada tiga indikator yang digunakan, yaitu peningkatan manajemen sekolah yang lebih transparan, partisipatif, demokratis, dan akuntabel yang hanya mendapatkan skor 45,29%. Kemudian indikator peningkatan implementasi pembelajaran yang berpusat pada siswa hanya mendapatkan skor 47,13%. Sedangkan indikator peningkatan peran serta masyarakat terhadap pendidikan di sekolah menengah atas mendapatkan skor terendah, yaitu hanya sebesar 39,84%.

Menurut laporan hasil evaluasi implementasi MBS yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Batanghari (2022) dijelaskan bahwa,

rendahnya implementasi MBS di SMA Negeri di Batanghari disebabkan karena perencanaan dan pelaksanaan MBS tidak dilakukan secara transparan. Kepala sekolah kurang melibatkan partisipatif guru dan komponen sekolah yang lain, dan cenderung mengambil keputusan sendiri tanpa melibatkan pendapat dari pihak lain atau kurang demokratis. Proses pengambilan kebijakan yang terkesan tertutup tersebut telah menyebabkan implementasi MBS kurang dapat dipertanggungjawabkan atau akuntabilitas menjadi rendah. Implementasi pembelajaran juga masih lebih banyak berpusat pada guru, aktivitas guru lebih dominan dibandingkan dengan aktivitas siswa karena guru-guru masih menerapkan sistem pembelajaran konvensional. Kepala sekolah dalam mengambil kebijakan kurang melibatkan guru dan masyarakat atau orang tua siswa.

Kebijakan dalam implementasi manajemen berbasis sekolah telah menjadi perhatian banyak pihak, termasuk para penelitian pendidikan yang telah melakukan kajian terhadap masalah tersebut, seperti penelitian yang dilakukan oleh Budiningsih (2021), dengan judul "Pengaruh Kepemimpinan, Motivasi, dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten" menunjukkan bahwa baik secara parsial maupun simultan ada pengaruh dan signifikan antara kepemimpinan, motivasi dan 10 lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten. Secara variabel berbeda, peneliti hanya fokus pada pola pengambilan keputusan.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas peneliti dapat mengkaji lebih lanjut mengenai Bagaimana implementasi MBS, peran kepala sekolah dalam penerapan MBS di Sekolah Menengah Atas Negeri di Kabupaten Batanghari yang akan dianalisis.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu suatu bentuk metode penelitian yang mengikuti proses pengumpulan data, penulisan dan penjelasan atas data dan setelah itu dilakukan analisis. Adapun sumber data yang digunakan ada 2 yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer berupa data yang diperoleh langsung dari informan misalnya kepala sekolah, guru, komite sekolah, siswa yang menjadi objek penelitian kepemimpinan. Sedangkan, Data sekunder diperoleh melalui dokumentasi di Sekolah Menengah Atas Negeri di Kabupaten Batanghari, seperti daftar hadir dan hasil kerja

lainnya. Sumber datanya yaitu para kepala sekolah, guru, komite sekolah.

Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan Dokumentasi. Pada Teknik analisis data Untuk menganalisis data dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis data model Milles & Huberman yaitu mereduksi data dan penyajian data.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah di Sekolah Menengah Atas Negeri Kabupaten Batanghari.

Hasil penelitian ini diarahkan untuk mencapai tujuan mengetahui bagaimana implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi yang dapat juga ditinjau dari prinsip-prinsip berdasarkan: (1) Manajemen kurikulum dan pembelajaran berbasis sekolah, (2) Manajemen peserta didik berbasis sekolah, (3) Manajemen pendidik dan tenaga kependidikan, (4) Manajemen sarana dan prasarana berbasis sekolah, (5) Manajemen pembiayaan berbasis sekolah, (6) Hubungan manajemen sekolah dan masyarakat berbasis sekolah, (7) dan Manajemen budaya dan lingkungan berbasis sekolah. Dalam hal ini hasil penelitian sudah diperoleh dari Data Rapor Pemetaan Pendidikan Hasil dari Evaluasi Direktorat Pembinaan SMA Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2022.

Hasil penelitian tersebut dapat dilihat dalam tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Hasil Evaluasi Penerapan MBS di Sekolah Menengah Atas Negeri Kabupaten Batanghari Tahun 2022

No	Indikator Penilaian	Skor Hasil Penilaian		
		SMAN 5	SMAN 4	SMAN 7
1.	Manajemen kurikulum dan pembelajaran berbasis sekolah	92.87	84.32	82.17
2.	Manajemen peserta didik berbasis sekolah	94.33	77.58	61.38
3.	Manajemen pendidik dan tenaga Kependidikan	85.44	74.29	43.81
4.	Manajemen sarana dan prasarana berbasis Sekolah	80.63	68.45	59.24

Manajemen				
5.	pembiayaan berbasis sekolah	79.47	64.22	53.67
Hubungan				
6.	manajemen sekolah dan masyarakat berbasis sekolah	74.83	63.55	52.31
Manajemen budaya dan lingkungan berbasis Sekolah				
7.		88.25	73.66	61.53
Total		595.82	506.07	414.11
Rata-rata		85.12	72.29	59.16
Kategori		Baik	Cukup	Buruk

Sumber: Rapor Pemetaan Pendidikan Hasil Evaluasi Direktorat Pembinaan SMA Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2022

B. Pembahasan

Berdasarkan data yang disajikan dalam Tabel 1 di atas, dapat diketahui bahwa SMA Negeri 5 Batanghari merupakan sekolah dengan rata-rata skor penerapan MBS tertinggi, yaitu mencapai 85,12 sehingga masuk dalam kategori baik, sedangkan untuk penerapan MBS di SMA Negeri 7 masuk dalam kategori buruk dengan skor penilaian sebesar 59,16. Penerapan MBS di SMA Negeri 4 Batanghari masuk dalam ketegori cukup baik dengan skor 72,29. Penerapan MBS di SMA Negeri 5 Batanghari yang baik ditopang oleh penerapan MBS dalam manajemen kurikulum dan pembelajaran berbasis sekolah masuk dalam kategori sangat baik dengan skor yang nyaris sempurna, yaitu sebesar 92, 87. Hal tersebut juga didukung dengan penerapan MBS yang berkaitan dengan manajemen peserta didik berbasis sekolah, yaitu masuk dalam kategori sangat baik dengan skor sebesar 94,33. Manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Manajemen sarana dan prasarana berbasis sekolah. Manajemen pembiayaan berbasis sekolah. Hubungan manajemen sekolah dan masyarakat berbasis sekolah. Manajemen budaya dan lingkungan berbasis sekolah.

Kurikulum seharusnya menjadi tolok ukur yang paling utama karena hal tersebut merupakan pembelajaran inti pada setiap sekolah, hal tersebut sepadan dengan buku yang dikeluarkan (Lukas, 2021) dalam buku Manajemen Berbasis Sekolah yang menyatakan sekolah merupakan ujung tombak pelaksanaan kurikulum, baik kurikulum nasional maupun muatan lokal, yang diwujudkan melalui proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, institusional, kurikuler, dan instruksional. Proses pembelajaran dapat dilaksanakan

secara efektif dan efisien, serta mencapai hasil yang diharapkan diperlukan kegiatan manajemen program pembelajaran.

Sekolah Menengah Atas Negeri dalam hal ini seharusnya lebih meningkatkan kompetensi guru yang dimiliki dan memberikan inovasi dan modifikasi kurikulum untuk memberikan efek yang baik kepada siswa agar lulusan dan proses belajar mengajar berjalan dengan lebih baik. Melakukan kegiatan MGMP Guru secara rutin, pelatihan, Workshop, berkomunikasi dengan DUDI serta melakukan perbaikan secara perlahan merupakan proses yang dapat dilakukan agar perkembangan kurikulum SMA Negeri dapat lebih maksimal.

Berdasarkan dari penelitian yang sudah dilakukan di SMA Negeri 5 Batanghari, SMA Negeri 4 Batanghari, dan SMA Negeri 7 Batanghari dalam bidang manajemen peserta didik dalam kategori yang sama hal tersebut terjadi karena sekolah tersebut memberikan akses yang lebih baik dalam bidang peserta didik, Sekolah Menengah Atas Negeri dapat memberikan pembinaan dalam proses dunia kerja yang dibutuhkan sebab SMA Negeri harus dapat memberikan hal tersebut agar SMA Negeri tidak kalah dengan lulusan SMA swasta. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Mulyasa (2020:40) yang menyatakan juga bahwa Manajemen kesiswaan bukan semata-mata hanya aspek pencatatan data siswa, namun juga aspek operasional yang berkaitan dengan perkembangan peserta didik. Mengembangkan potensi peserta didik dalam bidang akademik maupun non akademik, memberikan gagasan dan ide-ide. Hal tersebut sejalan dengan pendapat (Hendra, 2020) dalam jurnalnya yang berjudul "Manajemen Peserta Didik di SMA Negeri Keberbakatan Olahraga Lampung" Manajemen peserta didik keberadaannya sangat dibutuhkan dilembaga pendidikan karena siswa merupakan subjek sekaligus objek dalam proses transformasi ilmu dan keterampilan, keberhasilan dalam penyelenggaraan pendidikan akan sangat bergantung dengan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional dan kejiwaan peserta didik. Pihak sekolah memberikan layanan bagi setiap siswa agar potensi yang dimiliki dapat diketahui dan dikelola dengan lebih baik, memberikan akses yang lebih agar siswa dapat mengekspresikan dirinya yang lebih positif, pihak guru

memberikan konseling dan menggali potensi dari setiap peserta didik agar Manajemen peserta didik dapat berjalan dengan baik.

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan bahwa SMA Negeri 5 Batanghari dan SMA Negeri 4 Batanghari lebih unggul dibandingkan SMA Negeri 7 Batanghari hal tersebut terjadi karena guru atau tenaga pendidikan yang dimiliki SMA Negeri 5 Batanghari dan SMA Negeri 4 Batanghari merupakan tenaga pendidikan yang sudah berkompeten lama dalam bidang tertentu atau sudah memiliki sertifikat yang memadai, sedangkan SMA Negeri 7 Batanghari pihak tenaga pendidik umumnya masih dipilih dan diseleksi sendiri oleh pihak sekolah/kepala sekolah. Nurcahyo (2015) menjelaskan bahwa guru adalah kunci keberhasilan pendidikan karena guru berinteraksi langsung dengan siswa melalui kegiatan belajar. Kualitas guru akan menentukan kualitas lulusan sebagai output.

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan pada SMA Negeri 5, 4 dan 7 Batanghari memiliki kesamaan pada hasil yang sudah diolah, ketiga sekolah tersebut memiliki nilai yang cukup baik dari hal tersebut sudah tidak dapat dipungkiri bahwa setiap siswa akan melihat sekolah yang akan dipilih dilihat dari sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah tersebut, Mulyasa (2020:41). Manajemen sarana dan prasarana ini diharapkan dapat menciptakan sekolah yang lebih bersih, rapi, indah sehingga menciptakan kondisi yang menyenangkan baik bagi guru maupun murid untuk berada di sekolah. Maka Sekolah Menengah Atas Negeri berlomba-lomba untuk memenuhi dan memberikan sarana prasarana yang memadai antara lain gedung yang nyaman, alat yang memadai, dan teknologi yang digunakan pada sekolah tersebut. Masalahnya tidak semua SMA Negeri dapat dengan lancar memenuhi hal tersebut, banyak SMA Negeri yang masih memerlukan sarana dan prasarana memadai karena banyak SMA Negeri yang tidak mendapatkan dana yang memadai dari pemerintah dan susah untuk mengelola anggarannya sendiri dibanding dengan SMA Negeri yang unggul. Hal tersebut juga hal tersebut sejalan dengan pendapat (Ariyanto, Wiharna, & Noor, 2020). Sarana dan Prasarana adalah komponen penunjang dalam kegiatan belajar mengajar di Sekolah Menengah Atas (SMA), karena SMA sebagai

salah satu instansi pendidikan formal yang diharapkan mampu memberikan kontribusi secara intensif.

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan telah didapatkan bahwa beberapa Sekolah Menengah Atas Negeri yang ada di Kabupaten Batanghari lebih unggul dalam prinsip manajemen pembiayaan berbasis sekolah, hal tersebut dapat terjadi karena sekolah dalam hal pembiayaan mendapatkan dari pemerintah donatur, dan kerjasama dengan perusahaan, tetapi tidak semua SMA Negeri dapat memanfaatkan dan mendapatkan hal tersebut karena masih banyak SMA Negeri yang tidak bisa memperoleh akses untuk memperoleh dana dari pihak luar selain dari pemerintah.

Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia (2021:191) menyatakan manajemen pembiayaan dilaksanakan dengan memberikan subsidi kepada siswa, mengatur pembiayaan secara rinci dan benar, memiliki laporan keuangan yang jelas, dan melaporkan kepada masyarakat sekolah dengan transparan. Untuk mengatasi hal tersebut sekolah dapat melakukan perubahan dengan cara melaporkan dana sekecil apapun dalam pembukuan dan juga melakukan laporan dengan serinci mungkin, sekolah memperhitungkan nilai beban yang akan diberikan kepada siswa dengan melaksanakan rapat komite dan wali murid, sekolah melakukan pengelolaan dana dengan baik, memiliki laporan yang jelas, memiliki laporan yang dapat diakses oleh wali murid dan warga sekolah. Karena pembiayaan merupakan hal yang sangat sensitif dan menyangkut orang banyak, hal tersebut sesuai dengan pendapat (Dedy, 2020) Dalam penelitiannya yang berjudul *Manajemen Pembiayaan pendidikan Terhadap Mutu SMA* "Manajemen pembiayaan pendidikan di SMA berada pada kategori sangat tinggi, artinya sekolah harus mampu untuk melaksanakan manajemen pembiayaan pendidikan secara maksimal mulai dari perencanaan pembiayaan dan juga anggaran, implelementasi pembiayaan, pengawasan dan pengendalian pembiayaan, serta tanggungjawab atas daya yang digunakan"

Berdasarkan dari penelitian yang sudah dilakukan telah didapatkan bahwa SMA Negeri 5 Batanghari dan SMA Negeri 4 Batanghari lebih unggul dalam prinsip hubungan manajemen dan masyarakat, tetapi SMA

Negeri 4 Batanghari masih mendapatkan nilai yang belum signifikan. Hal tersebut terjadi karena SMA Negeri 4 Batanghari kurang dalam membangun kemitraan dan melibatkan peran serta masyarakat serta lembaga lain yang relevan karena SMA Negeri 5 Batanghari sudah mempunyai pemikiran bahwa SMA Negeri 5 Batanghari sudah diakui dalam berbagai bidang, SMA Negeri 7 Batanghari kurang melibatkan pemangku atau pihak sekolah dalam merencanakan pengelolaan sekolah, sehingga kurang mendapatkan feedback dari masyarakat.

Satu catatan penting yang perlu dilakukan pihak sekolah adalah memberi peran pada humas yang lebih besar untuk melakukan fungsi dan tugas yang diberikan serta menerima evaluasi karena peran humas sangat penting untuk menjadikan lulusan SMA dapat diterima dalam berbagai golongan hal tersebut sesuai dengan pendapat (Hakim, 2019) dalam penelitiannya yang berjudul *Manajemen Hubungan Masyarakat Dalam Mengembangkan Lembaga Pendidikan* "Evaluasi humas dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, dan yang terpenting dapat mengamati dan menilai program yang telah dilakukan dengan seksama.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan SMA Negeri 5 dan 4 memiliki nilai yang sama dengan predikat cukup baik. Hal tersebut membuat pihak SMA berusaha memberikan budaya dan lingkungan yang sebaik-baiknya dan dapat sebagai bekal untuk peserta didik dengan cara pendekatan yang menarik dan menyenangkan, hal tersebut sesuai dengan pendapat (Neprializa, 2020) dalam jurnal yang berjudul *Manajemen Budaya Sekolah* "Manajemen budaya sekolah yang kondusif bagi penyediaan dan pengembangan karakter positif siswa dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip berkelanjutan, terpadu, konsisten, implementatif, dan menyenangkan.

Pengembangan budaya sekolah diperlukan empat tahapan yaitu perencanaan program, sosialisasi program, pelaksanaan program, dan evaluasi program". Nilai dan moral yang diberikan dianggap bekal awal untuk menjadi pekerja yang baik dan disiplin, Dalam hal ini setiap SMA memberikan sikap jujur, disiplin, peduli, percaya diri, santun, berakhlak. Inovasi diperlukan serta sikap sering membaca akan menjadikan siswa lebih giat dalam segala aspek seperti yang

dikatakan dalam jurnal Schol-based curriculum innovations; A case study in mainland China (Edmond, 2020) sekolah sangat percaya bahwa membaca menciptakan budaya baru serta kemungkinan hidup untuk anak-anak. Dengan demikian, membangun budaya membaca dianggap sebuah cara yang efektif untuk budidaya pemikiran moral.

Peran Kepala Sekolah dalam Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah di Sekolah Menengah Atas Negeri Kabupaten Batanghari

1. Peran Kepala Sekolah Sebagai Entrepreneur. peran Kepala SMA Negeri 7 dalam menentukan visi, misi, tujuan dan sasaran sekolah sangat dominan. Peran kepala sekolah yang demikian menunjukkan adanya gaya kepemimpinan yang otoriter, dan dalam sistem birokrasinya cenderung top up dari atas ke bawah, atau dengan kata lain alur distribusi kewenangannya cenderung menggunakan model instruksional.
2. Peran Kepala Sekolah Sebagai Disturbance handler. Pengorganisasian Sumberdaya dalam Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada SMA Negeri yang ada di Kabupaten Batanghari memakai prinsip berkeadilan, dengan maksud pembagian tugas dilakukan berdasarkan kapasitas atau Job Discription, pengembangan beban kerja dan pengembangan mekanisme kerja, yaitu dengan pengkelompokan komponen MBS, pembentukan struktur wewenang, merumuskan dan menetapkan metode prosedur dan penyediaan fasilitas MBS berdasarkan perencanaan yang sudah disepakati. Hal ini mendukung proses implementasi MBS menuju kepada peningkatan mutu pendidikan. Sehingga proses pengorganisasian SMA Negeri yang ada di Kabupaten Batanghari akan terlaksana dalam konteks kebersamaan yang harmonis.
3. Peran Kepala Sekolah Sebagai Resource allocator. Peran kepala sekolah sebagai resource allocator artinya adalah menyediakan segala sumber daya sekolah yang didalamnya melibatkan proses mengidentifikasi fungsi-fungsi yang diperlukan untuk mencapai sasaran, menyusun rencana dan program peningkatan mutu, merumuskan rencana peningkatan mutu, merumuskan pelaksanaan evaluasi, dan merumuskan sasaran mutu. Kepala SMA Negeri 7 dalam menentukan visi, misi, tujuan dan

sasaran sekolah ditentukan oleh kepala sekolah dan tidak melibatkan pihak lain. Dengan demikian dapat dipahami bahwa peran Kepala SMA Negeri 7 dalam menentukan visi, misi, tujuan dan sasaran sekolah sangat dominan. Peran kepala sekolah yang demikian menunjukkan adanya gaya kepemimpinan yang otoriter, dan dalam sistem birokrasinya cenderung top up dari atas ke bawah, atau dengan kata lain alur distribusi kewenangannya cenderung akan menggunakan model instruksional.

Peran kepala sekolah sebagai negotiator roles. Kepala sekolah harus mampu untuk mengadakan pembicaraan dan musyawarah dengan berbagai pihak. Berkaitan dengan itu peran kepala sekolah diarah untuk merumuskan strategi sosialisasi. ala Sekolah cukup komunikatif dalam menyampaikan segala hal yang berkaitan dengan kebijakannya. Kepala Sekolah mampu memainkan peranannya sebagai seorang manajer atau pimpinan yang baik Komunikasi yang dipakai dua arah antara orang lain dan dirinya. Sering meminta informasi dan masukan tentang hubungan kerja antara dirinya dengan orang lain. Bahkan Kepala Sekolah minta dikritik apabila kurang pas, bahkan Kepala Sekolah membuka layanan surat baik terbuka atau pun rahasia asal sifatnya untuk membangun. Kepala Sekolah berani dikoreksi ataupun dimintai saran dan juga pendapat. bahwa Kepala SMA Negeri 7 dalam menentukan visi, misi, tujuan dan sasaran sekolah ditentukan oleh kepala sekolah dan tidak melibatkan pihak lain.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian diatas yang telah peneliti lakukan mengenai peran kepala sekolah dalam implementasi manajemen berbasis sekolah pada SMA Negeri yang ada di Kabupaten Batanghari maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

- 1 Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi yang dapat ditinjau dari prinsip-prinsip berdasarkan masih kurang optimal. Hal tersebut ditandai dengan Manajemen kurikulum dan pembelajaran berbasis sekolah masih rendah. Manajemen peserta didik berbasis sekolah, Manajemen

pendidik dan juga tenaga kependidikan, Manajemen sarana dan prasarana berbasis sekolah, Manajemen pembiayaan berbasis sekolah cukup baik. Hubungan manajemen sekolah dan masyarakat berbasis sekolah, dan Manajemen budaya dan lingkungan berbasis sekolah sangat kurang optimal.

- 2 Peran kepala sekolah dalam implementasi MBS sudah baik dan optimal. Peran tersebut sangat mendukung budaya mutu sekolah yang masuk menjadi visi dan misi sekolah. Hal ini dilakukan dengan: a) peningkatan kualitas guru dengan adanya unit penjaminan mutu sekolah yaitu audit mutu internal, b) budaya peserta didik dengan kebiasaan menjadi suatu iklim di sekolah, dan c) meningkatkan peran masyarakat dengan mengikutsertakan semua lapisan masyarakat sekolah menjadi jalinan kerjasama yang baik dan harmonis.

B. Saran

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengungkap manajemen berbasis sekolah dalam upaya mengembangkan aspek-aspek yang lain selain peran kepala sekolah.

DAFTAR RUJUKAN

- Arikunto, S. (2020). *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. (Edisi Revisi). Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto, S. dan Lia Yuliana, (2020). *Manajemen Pendidikan*, Yogyakarta: Aditya Media, 2020.
- Baharuddin dan Umiarso. (2021) *Kepemimpinan Pendidikan*, Cetakan Ke III. Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA.
- Barnawi dan Muhammad Arifin. (2022). *Kinerja Guru Profesional*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Budiningsih. (2021). Pengaruh Kepemimpinan, Motivasi, dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten. *Jurnal Pendidikan ProVitae* Vol X/3/Mei 2021.
- Bungin, B, (2019). *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Study Sosiologi, Kebijakan, Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group..
- Chairunnisa, C. (2021). *Manajemen Pendidikan dalam Multi Perspektif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada..
- Damopolii, M.. (2022). *Program Pendidikan Gratis, Idealisme atau Politisasi*. Cet.1. Samata Gowa: Alauddin University Press.
- Danim, S. (2020). *Visi Baru Manajemen Sekolah dari Unit Birokrasi ke Lembaga Akademik*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Danim, S., (2019). *Manajemen dan Kepemimpinan Transformasional Kepala Sekolah*, Jakarta: Rineka Cipta, 2019
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (2017). *Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah*. Jakarta: Dekdikbud.
- Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Tenaga Pendidikan, (2019). *Manajemen Berbasis Sekolah*, Jakarta: Depdiknas
- Donni dan Rismi, (2020). *Manajemen Supervisi dan Kepemimpinan Kepala Sekolah Bandung*: Alfabeta.
- Eutrovia Iin Kristiyanti dan Muhyadi. (2020). *Kepemimpinan Kepala Sekolah Perempuan*. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan* 3. No. 1 23 Oktober 2020. V3i1.6270.
- Ilyas Ismail, Muhammad. (2018). *Guru Sebuah Identitas*. Cet.1. Samata Gowa: Alauddin University Press.
- Karwati dan Donni (2018). *Kinerja dan Profesionalisme Kepala Sekolah*. Bandung: Alfabeta
- Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2018). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Lurah, I.H.S dan Haryanto. (2021). Peran Kepala Sekolah Dalam Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di SDIT Jabal Nur Gamping, Sleman. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan* 2. No. 2. 1 September 2021, V2i2.2447.

- Makawimbang, J.H (2019). Kepemimpinan Pendidikan yang Bermutu, Bandung: Alfabeta.
- Moleong, L.J (2020). Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E (2019). Menjadi Kepala Sekolah Profesional: Dalam Konteks Menyukkseskan MBS dan KBK, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E. (2020). Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep Strategi dan Implementasinya, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E. (2020). Menjadi Guru Profesional; Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan. Bandung: Remaja Rosda Karya
- Muspawi, M., (2020), Memahami Konsep Dasar Manajemen Peserta Didik. Jurnal Ilmiah Universitas Jambi.
- Nurkolis, (2019). Manajemen Berbasis Sekolah: Teori, Model, dan Aplikasi, Jakarta: Grasindo.
- Nurkolis. (2019). Manejemen Berbasis Sekolah. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000. tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
- Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
- Prastowo, A. (2021). Memahami Metode-Metode Penelitian. Yogyakarta: Ar- Ruzz Media.
- Said, A. (2018). Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Melestarikan Budaya Mutu Sekolah," *Journal Evaluasi* 2, No. 1.
- Saondi, O. dan Aris Suherman. (2022). Etika Profesi Keguruan. Bandung: Refika
- Aditama. Saroni, M. (2019). Manajemen Pendidikan Kiat Menjadi Pendidik yang Profesional, Yogyakarta: AR_Ruz.
- Sugiyono. (2021). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sujoko. (2019). Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Lingkungan Kerja dalam Penerapan MBS terhadap Kinerja Guru SMU Negeri 3 Sukoharjo. *Jurnal Pendidikan ProVitae* Vol VII/6/Juni 2019.
- Supardi. (2021). Kinerja Guru dan Kepala Sekolah. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Susanto, A.T dan Muhyadi Muhyadi. (2021). Peran Kepala Sekolah Dalam Pengembangan Kompetensi Guru di Sekolah Menengah Pertama Negeri. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan* 4. No. 2 22 September 2021.
- Suwarno, W. (2019). Dasar-dasar Ilmu Pendidikan, Yogyakarta: AR_Ruz. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Usman, (2016) Pegantar Kepemimpinan Pendidikan, Surabaya: Usaha Nasional.
- Wahjosumijo, (2019). Kepemimpinan Kepala Sekolah Tinjauan Teoretik dan Permasalahannya, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wibowo. (2018). Manajemen Kinerja Pendidikan. Jakarta: Raja Grafindo Pustaka.
- Yamin, M. dan Maisah. (2020). Standarisasi Kinerja Guru dan Kepala Sekolah. Jakarta: Persada Press.
- Yaumi, M. (2021). Model Perbaikan Kinerja Guru dalam Pembelajaran, Cet.1. Samata Gowa: Alauddin University Press.